

ABSTRAK

Program *Jo Kawin Bocah* merupakan salah satu program pencegahan perkawinan anak yang diterapkan di Kabupaten Banyumas. Prinsip yang perlu diterapkan dalam program ini adalah partisipatif, mengingat perkawinan anak merupakan fenomena yang kompleks dan saling mempengaruhi. Partisipasi dari *stakeholder* terkait sangat dibutuhkan dalam program ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran *stakeholder* serta mendeskripsikan dan menganalisis proses komunikasi partisipatif antar*stakeholder* yang terjadi dalam program *Jo Kawin Bocah* dengan dianalisis menggunakan empat indikator komunikasi partisipatif dari Jan Servaes (2005) yaitu heteroglasia, dialog, poliponi, dan karnaval. Selain itu, digunakan pula dua teori untuk melakukan analisis *stakeholder*. Teori pertama adalah teori klasifikasi peran *stakeholder* menurut Nugroho (2014) yang membagi *stakeholder* ke dalam lima peran yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator. Teori kedua adalah teori pengkategorian *stakeholder* menurut Ackerman dan Eden (2011) yang membagi *stakeholder* ke dalam empat kategori berdasarkan pengaruh dan kepentingannya yaitu *key players*, *subjects*, *context setters*, dan *crowd*. Dalam penelitian ini, dianalisis pula strategi komunikasi partisipatif yang dapat diterapkan dalam program tersebut dengan pendekatan strategi komunikasi partisipatif dialogis oleh Tufte dan Mefalopoulos (2009).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria para informan tersebut adalah mereka merupakan pihak yang terlibat, terkait, dan berpengaruh langsung dengan fenomena perkawinan anak dan program *Jo kawin Bocah*. Berdasarkan kriteria tersebut, informan yang diambil adalah lembaga pemerintah Banyumas, organisasi dan kelompok masyarakat, lembaga pendidikan sekolah menengah, dan aktivis perlindungan.

Hasil dari penelitian yang pertama menunjukkan bahwa terdapat 14 *stakeholder* yang terkait dengan *Jo Kawin Bocah* di Kabupaten Banyumas dengan peran yang berbeda, yaitu: (1) *policy creator* adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah desa, dan pengadilan agama; (2) koordinator adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas; (3) fasilitator meliputi DPPKBP3A, YSBS Mino Martani, pemerintah desa, Dinkominfo Banyumas, dan sekolah; (4) implementer meliputi Forum Anak Banyumas, PKK, kader masyarakat; (5) akselerator meliputi KUA, akademisi, dan dunia usaha. Hasil kedua menunjukkan bahwa proses komunikasi partisipatif dalam program *Jo Kawin Bocah* sudah terjadi, diukur dengan indikator heteroglasia, dialog, poliponi, dan karnaval. Akan tetapi dalam setiap indikatornya masih terdapat permasalahan yaitu belum terlibatnya dunia usaha dan Dinkominfo, belum semua kegiatan dalam program *Jo Kawin Bocah* memunculkan adanya dialog, belum adanya kerja sama dan sinergitas antar*stakeholder*, dan belum maksimalnya penggunaan media digital maupun konvensional sebagai sarana sosialisasi. Strategi komunikasi partisipatif yang dapat diterapkan dalam program *Jo Kawin Bocah* adalah pendekatan strategi komunikasi partisipatif dialogis dengan enam langkah strategi yaitu menentukan tujuan SMART, mendefinisikan *stakeholder* yang relevan, menentukan tingkat perubahan, menentukan pendekatan komunikasi, mengatasi masalah utama, dan mempertimbangkan hasil yang diharapkan.

Kata kunci: *Jo Kawin Bocah*, perkawinan anak, *stakeholder*, komunikasi partisipatif.

ABSTRACT

The Jo Kawin Bocah Program is one of the child marriage prevention programs implemented in Banyumas Regency. The principles that need to be applied in this program are participatory, considering that child marriage is a complex phenomenon and affects each other. Participation from relevant stakeholders is needed in this program. This study aims to identify the role of stakeholders and describe and analyze the participatory communication process between stakeholders that occurs in the Jo Kawin Bocah program by analyzing using four participatory communication indicators from Jan Servaes (2005), namely heteroglacia, dialogue, polypony, and carnival. In addition, two theories are also used to conduct stakeholder analysis. The first theory is the theory of stakeholder role classification according to Nugroho (2014) which divides stakeholders into five roles, namely policy creator, coordinator, facilitator, implementer, and accelerator. The second theory is the theory of categorizing stakeholders according to Ackerman and Eden (2011) which divides stakeholders into four categories based on their influence and importance, namely key players, subjects, context setters, and crowds. In this study, participatory communication strategies that can be applied in the program were also analyzed with a dialogical participatory communication strategy approach by Tufte and Mefalopulos (2009).

This research uses qualitative methods with a case study model. Data collection was conducted using observation, interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling techniques with the criteria of these informants being that they were parties involved, related, and directly influential with the phenomenon of child marriage and the Jo kawin Bocah movement. Based on these criteria, the informants taken were Banyumas government agencies, community organizations and groups, secondary school education institutions, and child protection activists.

The results of the first study showed that there were 14 stakeholders related to Jo Kawin Bocah in Banyumas Regency with different roles, namely: (1) policy creators are the Central Java Provincial Government, village governments, and religious courts; (2) the coordinator shall be the Banyumas Regency Government; (3) facilitators including DPPKBP3A, YSBS Mino Martani, village government, Banyumas Communication and Information Office, and schools; (4) implementers including Banyumas Children's Forum, PKK, community cadres; (5) accelerators include KUA, academia, and the business world. The second result showed that the participatory communication process in the Jo Kawin Bocah program had already occurred, measured by indicators of heteroglacia, dialogue, polypony, and carnival. However, in each indicator, there are still problems, namely the lack of involvement of the business world and Dinkominfo, not all activities in the Jo Kawin Bocah program have led to dialogue, there has been no cooperation and synergy between stakeholders, and the lack of maximum use of digital and conventional media as a means of socialization. Participatory communication strategies that can be applied in the Jo Kawin Bocah program are dialogical participatory communication strategy approaches with six strategic steps, namely finding SMART goals, defining relevant stakeholders, determining the level of change, determining communication approaches, addressing key problems, and considering expected results.

Keywords: Jo Kawin Bocah, child marriage, stakeholders, participatory communication